

Sejarah Indonesia: Peralihan Konsep Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural

oleh

Babul Bahrudin

Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris IPS, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
babulbahrudin@email.com

Fika Anjana

Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris IPS, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
fikaAnjana16@gmail.com

Submitted: dd-mm-yy

Reviewed: dd-mm-yy

Accepted: dd-mm-yy

ABSTRAK

Indonesia dalam sejarah peralihan konsep masyarakat majemuk menuju masyarakat yang multikultural tidak bisa dilepaskan dari tuntutan menjadi Negara kesatuan dengan keberagamannya. Indonesia terbentuk bukan karena kesamaan warna kulit, golongan, ras, ataupun agama melainkan karena rasa kesatuan yang kuat atas dasar kedamaian dan kemerdekaan sejati. Indonesia terpisah secara rasial dari masa Hindia Belanda hingga pada masa orde baru. Masa Orde baru muncullah kemudian paham “mono-kulturalisme” yang bercirikan penyeragaman atas berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya. Sehingga, peralihan konsep masyarakat majemuk sebagai masyarakat yang terpisah berdasarkan garis budaya masing-masing untuk disatukan menjadi masyarakat yang multikulturalisme atau dikenal dengan masyarakat yang menghargai perbedaan budaya yang lahir dari kelompok-kelompok pendukung budaya.

Kata Kunci: Masyarakat majemuk, Multikulturalisme.

ABSTRACT

Indonesia in the history of the transition of the concept of compound society to a multicultural society cannot be separated from the demands of being a unitary State with its diversity. Indonesia was not formed because of the similarity of skin color, group, race, or religion but because of a strong sense of unity on the basis of true peace and independence. Indonesia was racially separated from the Hindi Dutch until the time of the new period. The new period emerged then ideology "mono-culturalism" which characterized the uniformity of various aspects, social system, politics and culture. Thus, the transition of the concept of compound society as a separate society based on their respective cultural lines to be united into a multiculturalism society or

known as a society that respect cultural differences born from cultural support groups.

Keywords: *Compound society, Multiculturalism,*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang tidak bisa lepas dari faktanya sebagai Negara yang beragam. Keberagaman ini bisa dilihat dari banyaknya suku bangsa, budaya, bahasa dan sebagainya. Keanekaragaman dan kompleksitas budaya di Indonesia mempunyai implikasi yang menuntut Indonesia untuk mempunyai ideologi yang bisa menyatukan dari berbagai perbedaan. Tidak bisa dipungkiri, berbagai macam perbedaan merupakan pemicu dari adanya gesekan. dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan. Akan tetapi, perbedaan ketika bisa diatasi dengan sebuah ideologi kebangsaan akan memberikan warna tersendiri dan menjadi identitas sebuah Negara. Mannan & Thung Ju Lan (2014) dijelaskan bahwa Negara yang beragam bagaikan satu kesatuan mata uang dengan dua sisinya yang paling terkait dan melengkapi. Indonesia juga bisa dilihat dari suatu ikatan budaya yang menyatukan dan mengikat masyarakat plural Indonesia menjadi suatu bangsa. Idealnya, nasionalisme Indonesia menggambarkan ikatan budaya yang menyatukan dan juga mengikat rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam ikatan suatu Negara-bangsa.

Ketika Indonesia lahir sebagai sebuah Negara. Indonesia merupakan kelanjutan dari sejarah masyarakat yang disebut Hindia Belanda. Masyarakat di bawah penjajah Barat ini merupakan masyarakat majemuk, masyarakat yang terpisah-pisah berdasarkan kelas sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan. Antara penguasa dan rakyat terpisah secara garis rasial. Selain itu ada pemisahan suku bangsa terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan hubungan-hubungan sosial. Sejak kemerdekaan Indonesia, pendiri bangsa kita telah berpikir dengan cerdas antara realitas dan harapan mereka. Bahkan orang-orang Indonesia memiliki satu bangsa tetapi memiliki pluralistik bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan pandangan politik percaya. Pancasila, diharapkan untuk menjadi kesatuan, mencapai bangsa yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran track yang

bersejarah ini tercermin dalam pita yang dicengkeram oleh lambang negara Republik Indonesia (Wasino, 2013)

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertical struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertical antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan suku-bangsa agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk (Nasikum, 2003). Pluralitas dalam arti masyarakat majemuk, kemudian dialihkan atau menjadikan suatu pemahaman masyarakat yang multikultural. Artinya, masyarakat multikultural diharapkan menjadi ideologi atau pandangan tentang menghargai perbedaan budaya yang lahir dari kelompok-kelompok pendukung budaya. Hal ini hadir dari kenyataan keberagaman budaya yang cenderung dengan adanya konflik-konflik sosial maka diikat dengan semboyan “Bhinneka Tungga Ika”. Walaupun pada dasarnya masih merupakan cita-cita bangsa yang masih terus menerus diperjuangkan.

Kenyataan dari berbagai keberagaman suku Bangsa menjadi masalah yang serius bagi Indonesia terutama untuk menjaga persatuan bangsa. Gesekan antar suku berdasarkan asas kesukuan akan menimbulkan konflik sosial. Maka, pentingnya pemahaman masyarakat tentang konsep multikulturalisme sebagai pandangan yang menguatkan persatuan di atas berbagai macam perbedaan (Bahrudin, 2021). Multikulturalisme dalam hal ini bisa saja diartikan bagian upaya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari latar perbedaan yang erat dengan sikap etnosentris dari kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat. Yang menjadi penting, muncul pertanyaan apakah model multikulturalisme yang dilakukan semenjak menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah berhasil. Menurut Syaifuddin (2006) dijelaskan bahwa hingga saat ini, pembicaraan tentang multikulturalisme di Indonesia belum selesai. Kebanyakan penulis tentang multikulturalisme di Indonesia lebih memusatkan perhatian pada tujuan daripada proses untuk mencapainya. Mereka menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, menjaga kerukunan,

menghormati perbedaan, dan sebagainya yang lebih merupakan isu falsafah humanistik individual daripada sosial-kolektif, padahal suatu model adalah berbicara tentang konsep-konsep dan strategi-strategi untuk mewujudkan konsep-konsep yang abstrak itu menjadi tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Masyarakat Majemuk dan Masyarakat Multikulturalisme

1. Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Hal ini dapat kita contohkan bagaimana kondisi Indonesia yang terdiri atas kelompok yang mempunyai identitas kebudayaan yang berbeda. Syaifuddin, menjelaskan bahwa Indonesia dipandang sebagai contoh masyarakat majemuk dengan pandangan pluralisme karena anekaragam masyarakat dan kebudayaannya, setidaknya pada masa lampau, kurang berinteraksi satu sama lain, hal ini juga dilatarbelakangi antara lain karena faktor geografis kepulauan (Syaifuddin, 2006). Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power.

Menurut Furnivall dalam Nasikun (2003:29) masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia disebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Di dalam kehidupan politik pertanda paling jelas itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh.

Menurut Furnivall dalam Nasikun (2003:30) setiap masyarakat politik, dari kelompok nomad sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui suatu periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaan sendiri. Sedangkan menurut Clifford Geertz dalam Nasikun (2003:33), masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub system terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Kemudian menurut Wasino, dijelaskan bahwa masyarakat plural adalah masyarakat dengan sistem nilai yang di adopsi oleh berbagai kesatuan sosial menjadi bagiannya sehingga anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan, keseragaman budaya menyebabkan kurangnya dasar loyalitas untuk saling mengerti satu sama lain. (Wasino, 2013).

2. Masyarakat Multikultural

Secara etimologi, multikulturalisme berasal dari kata multicultural dan isme. Kata multicultural memiliki makna sebagai multi atau banyak budaya. Sedangkan isme adalah sebuah ideologi, konsep atau ajaran. Jadi makna Multikulturalisme adalah ideologi atau konsep multicultural. Konsep Multikultural atau multikulturalisme merupakan konsep tentang menghargai perbedaan budaya yang lahir dari kelompok-kelompok pendukung budaya. Bentuk apresiasi adalah toleransi antara mereka untuk menciptakan masyarakat dunia yang harmonis yang ditandai dengan menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia tanpa pandang bulu dengan perbedaan tersebut (Wasino, 2013). Begitu juga seperti yang dijelaskan oleh Mahfud (2006) bahwa Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman kultural. Jadi, Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu suku bangsa, ras, gender, dan umur. Ideology multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan

proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat.

Dengan demikian konsep masyarakat multikultural dengan masyarakat majemuk sangat berbeda. Jika masyarakat majemuk adalah suatu kondisi dimasyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan (diferensiasi sosial) yang terdiri dari berbagai strata, ekonomi, ras, suku bangsa, agama dan budaya yang berjalan dengan apa adanya. Masyarakat ini masih seperti masyarakat pada umumnya dengan berbagai realitas sosial, masih terdapat konflik, pertentangan dan realitas sosial lainnya. Sedangkan masyarakat multikultural adalah suatu kondisi masyarakat yang majemuk yang telah tercapai sebuah keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Pada masyarakat ini, dengan banyaknya diferensiasi sosial masyarakat tercipta suatu keharmonisan, saling menghargai, kesederajatan dan mempunyai kesadaran tanggungjawab sebagai satu kesatuan.

Konsep Masyarakat Majemuk dan Multikulturalisme Pada Masa Penjajahan Belanda dan setelah Kemerdekaan Indonesia

1. Kemajemukan pada Masa Penjajahan Hindia Belanda

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman budaya yang bisa kita sebut sebagai masyarakat multikulturalisme, atau juga sebagai konsep lama yaitu sebagai masyarakat majemuk. Sebagai masyarakat majemuk menurut Pierre L. van den Berghe dalam Nasikun, (2003;33) menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk yakni: (1). Terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, (2). Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. (3). Kurang mengembangkan consensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4). Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, (5). Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan yang saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6). Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Masyarakat Indonesia memang termasuk masyarakat yang majemuk, hanya saja

perlu kita sadari, bahwa berbeda dengan Furnivall yang mengartikan pluralism masyarakat Indonesia didalam konteks masyarakat kolonial yang membedakan golongan-golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi, maka pluralitas masyarakat Indonesia sesudah masa revolusi kemerdekaan harus dimengerti di dalam konteks perbedaan-perbedaan internal diantara golongan pribumi. Pengertian pluralitas masyarakat Indonesia yang membedakan; golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Furnivall memang cukup valid untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi. Pertama yaitu keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia menjadi kurang lebih 3000 pulau. Faktor yang kedua, kenyataan bahwa Indonesia terletak diantara samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Iklim yang berbeda-beda serta struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan nusantara ini (Nasikun, 2003:34-37).

Sejak zaman klasik yaitu pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia tepatnya pada saat titik puncak zaman kerajaan Majapahit. Indonesia atau Nusantara pada saat itu telah dihuni berbagai macam etnis dan ras yang saling berinteraksi dengan membawa budayanya sendiri. Tentu yang menjadi etnis dominan adalah orang Jawa dengan kebudayaan Hindhu menjadi budaya dominan. Akan tetapi ketika itu tidak terjadi suatu pemaksaan kehendak dari etnis dominan kepada etnis minoritas yang beragama bukan Hindhu. Dari sejumlah catatan menunjukkan bahwa banyak etnis yang hidup di wilayah Majapahit seperti Cina, Arab, Persia, dan India yang sebagian besar beragama Islam. Mereka tinggal di wilayah pesisir pantai utara Jawa yang kemudian melahirkan pusat ekonomi dan pusat kekuasaan Islam di tanah Jawa. Dengan demikian ada pluralisme dalam kehidupan masyarakat Majapahit ketika itu. Begitu juga pada masa masuknya Islam di Jawa hubungan antar etnik pada masa perkembangan Islam tersebut juga masih terlihat. Di sepanjang pantai utara Jawa banyak sekali peninggalan sejarah baik berupa makam, tempat ibadah yang mengindikasikan hubungan antar etnik. Selain itu juga produk budaya seperti batik, seni tradisi yang menggambarkan adanya silang budaya antar antar etnik tersebut. Di Lasem masih terlihat sisa-sisa bangunan, seni batik yang menggambarkan adanya

silang budaya antara etnis Tionghoa (Cina) dengan Jawa. Demikian pula yang terjadi dengan bekas Kesultanan Demak yang menyisakan peninggalan sejarah silang budaya antara Hinduisme, Konfucionisme, Jawaisme, dan Islam. Mereka hidup dalam sebuah hubungan antar etnis yang cenderung harmonis, tidak ada sebuah dominasi satu pendukung budaya dengan budaya lain, terjadi sebuah akulturasi antar budaya.

Hubungan multikultur yang harmonis menjadi terganggu pada masa Kolonialisme Belanda. Penguasa Belanda membawa budaya Barat sebagai simbol dominasi. Kebudayaan Barat dipandang lebih super dibandingkan dengan budaya lain dari timur, terutama dari penduduk bumiputra. Meskipun jumlah penduduk kulit putih (terutama Belanda di Nusantara) tidak banyak, namun ideologi kekuasaan yang mereka pegang telah membuat budaya dominan adalah budaya Barat. Di luar budaya yang dianut oleh para penguasa terdapat banyak budaya yang dianut oleh penduduk yang dikuasai. Mereka berasal dari berbagai etnis dan tingkatan sosial. Situasi masyarakat seperti ini dinamakan sebagai masyarakat plural atau majemuk (Wasino, 2013)

Kemajemukan pada masyarakat ini menyebabkan konflik-konflik sosial yang diakibatkan dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tanpa ideology yang mendasari persatuan bangsa. Apalagi konflik di Indonesia adalah konflik antara etnis dan budaya kekerasan berakar pada kebijakan pemerintah kolonial dimasa lampau. Sumbernya tidak lain yakni kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menciptakan dualisme kekuasaan melalui sistem pemerintahan bayangan. Disatu pihak pemerintah kolonial menempatkan dirinya sebagai penguasa tertinggi untk semua namun dipihak lain penguasa-penguasa lokal dipelihara dan dipertahankan eksistensinya dalam rangka efektifitas dan efesiensi colonialialisme yang sedang berlangsung. Dengan mempertahankan keberadaan dan memperalat penguasa local dengan seluruh infrastrukturnya (Suminar,2013:135)

Konsep masyarakat majemuk yang dikaitkan dengan penjajahan Belanda ini juga senada dengan Charles dalam Thun Ju Land dan M.'Azzam Manan (2011:95) yang berpendapat bahwa pada saat penjajahan belanda ada kesadaran tentang rasa Nasionalisme, di mana nasionalisme sendiri adalah segelintir orang, orang intelek,

mahasiswa kelas tinggi, yang menyebar kemana-mana hingga ke Tapanuli. Colonial menganggapnya sebagai ancaman. Oleh Karena itu, Negara Kolonial harus melawan nasionalisme tersebut dengan membangun kembali apa yang disebut adat, atau menjadikan yang majemuk. Belanda merasa takut dengan nasionalisme sehingga dibentuklah kesadaran-kesadaran etnik. Jadi seperti hal nasionalisme, kesadaran etnik juga merupakan sebuah bikinan yang dibangun melalui naskah, diskusi dan sebagainya. Kesadaran etnik dibangun untuk menghadapi nasionalisme Indonesia yang menyadarkan diri pada persatuan dengan adat maka timbul perbedaan-perbedaan.

Pemerintahan Hindia-Belanda yang berlangsung lama tidak pernah bisa menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, melainkan telah mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlain-lainan antara golongan penduduk Eropa, Timur Asing, dan golongan penduduk pribumi masing-masing. Perlakuan ini bukan tidak mungkin mempunyai pengaruh terhadap hubungan-hubungan sosial di antara mereka ketika bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya (Nasikun, 2003:72).

2. Masyarakat Majemuk Setelah Kemerdekaan Indonesia

Konsep masyarakat majemuk untuk menamai keanekaragaman Indonesia berlangsung hingga Orde Baru. Seperti yang dijelaskan oleh Dewantara, (2015) proses pandangan mengenai masyarakat multikulturalisme itu sudah muncul dan dibentuk pendiri bangsa ini, akan tetapi telah terdistorsi pada masa Orde Baru. Seperti kutipan perkataan Soekarno yang dijelaskan Mubit (2016) bahwa Soekarno pernah menegaskannya, saat ditanya mengenai siapa bangsa Bangsa Indonesia adalah semua suku yang mendiami wilayah bekas jajahan hindia-belanda, baik keturunan maupun siapa pun yang memiliki kesamaan watak, hasrat kuat bersatu padu dan rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Sehingga jika bertumpu pada perkataan Soekarno tersebut maka jelas bahwa bangsa Indonesia terbentuk bukan karena kesamaan warna kulit, golongan, ras, ataupun agama melainkan karena rasa kesatuan yang kuat atas dasar kedamaian dan kemerdekaan sejati.

Masalah konsep multikulturalisme pada saat masa orde baru dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara. Muncullah kemudian paham “monokulturalisme” yang bercirikan penyeragaman atas berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya. Suparlan (2002) juga menjelaskan bahwa multikulturalisme akan menyentuh berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, keadilan, penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti, penghormatan atas golongan minoritas, prinsip-prinsip etika-moral, dan mutu produktivitas.

Pada masa Orde Baru, negara menjadi penafsir utama kebudayaan dengan meletakkan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau disingkat “P4” sebagai simbol budaya tunggal. Sebagai sebuah pemikiran, konsep “P4” sesungguhnya merupakan sebuah tafsir budaya atas Pancasila oleh rezim Suharto merupakan sesuatu yang harus dihargai. Persoalannya adalah ketika tafsir itu kemudian dijadikan indoktrinasi dalam bentuk politik negara yang membuat semua pendukung budaya harus mengikuti tafsir tunggal tersebut. Dalam hal ini terjadi pengabaian terhadap multikulturalisme. Tafsir budaya tunggal dalam bentuk indoktrinasi “P4” yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “Jawanisasi” melahirkan perasaan perlawanan dari kelompok pendukung budaya lain. Perlawanan itu menjadi anti klimak pasca lengsernya Suharto yang berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Proses menyatukan cara berpikir ke dalam Indonesia sering menimbulkan problem-problem benturan budaya. Dominasi negara dan kelompok pendukung budaya dominan telah menafikkan keberagaman yang merupakan takdir Tuhan (Wasino,2013)

Dengan demikian setelah masa kemerdekaan Indonesia sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menyatukan masyarakat Indonesia dengan segala perbedaan yang melatar belakangi terjadinya konflik. Misalnya dengan adanya Pancasila sebagai Ideologi, Semboyan Tunggal Ika dan sebagainya untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikulturalisme. Pancasila ini menjadi penting karena makna nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila memberikan pengertian warga negara tentang kehidupan bangsa Indonesia dan mengandung harapan yang harus diwujudkan, berupa berkeyakinan berdasarkan kepercayaan,

menjunjung tinggi akan harkat dan martabat, persatuan, pengakuan pengakuan akan kedaulatan rakyat, dan keadilan (Zurohman, 2021).

Multikulturalisme merupakan konsep baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun esensinya pernah menjadi pemikiran para pendiri bangsa. Akibat kurangnya pemahaman multikultural tersebut persoalan hubungan antar ras, etnis, agama, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia sering diwarnai hubungan yang kurang harmonis didasarkan pada ikatan primordial. Hal ini sering menimbulkan sikan *intolerance* dan konflik-konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi sekarang ini atau lebih tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia tidaklah terlalu parah sebagai mana yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Konflik yang sering kita jumpai dimasyarakat Indonesia sesudah revolusi kemerdekaan bukanlah konflik antara golongan-golongan yang bersifat eksklusif seperti keadaanya pada masa penjajahan, melainkan merupakan konflik antara golongan-golongan yang sedikit banyak bersifat silang menyilang.

Perbedaan suku bangsa yang pada masa penjajahan lebih merupakan perbedaan ras, tidak lagi jatuh berhimpitan dengan perbedaan-perbedaan agama, daerah dan pelapisan sosial. Perbedaan antara suku bangsa Jawa dan suku bangsa-suku bangsa lain diluar Jawa tidaklah dengan sendirinya merupakan perbedaan antara golongan Islam Santri, golongan Islam abangan, dan golongan Kristen. Mereka yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota dari suatu golongan agama yang sama, serta begitu juga sebaliknya. Perbedaan perbedaan suku bangsa, agama daerah dan pelapisan sosial saling silang-menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang menyilang juga. *Cross-cutting affiliations*, yang demikian telah menyebabkan konflik konflik antara golongan di Indonesia bagaimanapun tidak menjadi terlalu tajam konflik suku bangsa, misalnya akan segera direduksi oleh bertemunya loyalitas agama, daerah, dan pelapisan sosial dari para anggota suku bangsa-suku bangsa yang terlibat didalam pertentangan tersebut (Nasikun, 2003:85-87). Oleh karena itu, peralihan dari kemajemukan menuju masyarakat yang multicultural harus terus ditanamkan atau diintegrasikan dalam sebuah sistm nilai-nilai sosial kebudayaan masyarakat. .

Kesimpulan

Multikulturalisme sebagai pandangan untuk menyatukan segala macam perbedaan menjadi bagian dari ideology Pancasila. Dengan demikian, masyarakat harus bisa memahami dan menerapkan konsep multikulturalisme yang tentu berbeda dengan konsep masyarakat yang majemuk, dengan beraneka ragam suku agama dan ras memerlukan tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal, dan sesuai dengan falsafah bangsa. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat, oleh karena itu fungsi dan kedudukannya adalah sebagai alat pemersatu bangsa, untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai Ideologi bangsa, juga perlu memberikan pemahaman yang benar tentang konsep multikulturalisme sehingga masyarakat bisa terus bisa hidup berdampingan dengan banyaknya latar belakang perbedaan yang ada, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan jalan pendidikan Multikulturalisme. Pendidikan multikultural dimulai dari politik pendidikan yang tercermin dalam undang-undang pendidikan dan peraturan-peraturan pemerintah yang dilahirkannya. Dalam tataran yang lebih rendah kurikulum lembaga pendidikan harus diolah sedemikian rupa sehingga memungkinkan memasukkan aspek multikulturalisme dalam lembaga pendidikan. Sosialisasi dan enkulturasi dilakukan dengan mengembangkan sebuah sistem di sekolah yang menghargai perbedaan. Sementara itu bahan-bahan ajar dibuat sedemikian rupa sehingga melahirkan pemahaman tentang multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Zurohman, Achmad. 2021. Peran PKn dalam Membentuk Warga Negara Berpancasila. *Jurnal Civicos: Civic and Social Studies*, Vol. 05 No. 1, hlm. 24-30. Diperoleh dari <https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/viewFile/793/804> (diunduh 05 Oktober 2021).

- Bahrudin, Babul. 2021. Dinamika kebudayaan Suku Baduy dalam Menghadapi Perkembangan Global di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Civicos: Civic and Social Studies*, Vol. 05 No. 1, hlm. 31-47. Diperoleh dari <https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/view/795> (diunduh 06 Oktober 2021).
- Dewantara, Agustinus Wisnu. 2015. Pancasila dan multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 15 No. 2, hlm. 109-126. Diperoleh dari <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/53>. (diunduh 05 Januari 2021).
- Ju Lan, Thung dan Manan, M.'Azzam. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Lipi Press. J
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mubit, Rizal. 2016. Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé*, Vol. 11, No. 1, hlm. 163-184. Diperoleh dari <http://178.128.61.209/index.php/epis/article/view/104>. (diunduh 02 Januari 2021).
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suminar, dkk. 2013. *Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Bupara Nugraha,
- Suparlan, Parsudi., 2002, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, dalam Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Juli
- Syaifuddin, Achmad Fedyani. 2006. *Membumikan Multikulturalisme di Indonesia*. Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI. Vol. II. No. 1. Hlm 3-11. Diperoleh dari https://www.academia.edu/download/33273986/Etnovisi_Vol_II_No_1_April_2006.pdf#page=7. (diunduh 07 Januari 2021)
- Wasino, 2013, *Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism*. JurnalParamita Vol. 23, No. 2. Diperoleh dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/2665>. (diunduh 03 Januari 2021)